



Sollicitudo Rei Socialis Dan Migrasi : Mencari Solusi Kemanusiaan Di Tengah Krisis Global

Maria Erdila Dete^{1*}, Teresia Noiman Derung²,

¹ Sekolah Tinggi Pastoral-Institut Pastoral Indonesia Malang

Alamat: Jl. Seruni No.06, Lowokwaru, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65141

Korespondensi penulis: mariaerdiladete@email.com

Abstract. *In the 21st century, the increasingly complex phenomenon of global migration has become a major challenge for humanity, as migration issues are often linked to conflict, poverty, social injustice, and climate change. In this context, the encyclical Sollicitudo Rei Socialis written by Pope John Paul II provides a relevant framework for understanding and responding to the migration crisis. This document emphasizes that in order to build a more just and humane society, human dignity, social justice, and global solidarity are essential. The purpose of this study is to instill the extent to which the principles contained in Sollicitudo Rei Socialis can serve as a basis for developing comprehensive solutions to the migration problem. This study will find the difficulties and opportunities in applying these principles in migration policies by investigating the literature and analyzing cases. This study is expected to help develop more humane and sustainable migration policies. In addition, this study is expected to inspire the wider community to participate in solidarity efforts towards migrants.*

Keywords: *Humanitarian Crisis, Human Dignity, Migration, Global Solidarity, Sollicitudo Rei Socialis.*

Abstrak. Di abad ke-21, fenomena migrasi global yang semakin kompleks menjadi tantangan besar bagi umat manusia, karena masalah migrasi seringkali dikaitkan dengan konflik, kemiskinan, ketidakadilan sosial, dan perubahan iklim. Dalam konteks ini, ensiklik *Sollicitudo Rei Socialis* yang ditulis oleh Paus Yohanes Paulus II, memberikan kerangka pemikiran yang relevan untuk memahami dan menanggapi krisis migrasi. Dokumen ini menekankan bahwa untuk membangun masyarakat yang lebih adil dan manusiawi, martabat manusia, keadilan sosial, dan solidaritas global sangatlah penting. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menanamkan seberapa besar prinsip-prinsip yang terkandung dalam ensiklik *Sollicitudo Rei Socialis* dapat berfungsi sebagai dasar untuk mengembangkan solusi yang menyeluruh untuk masalah migrasi. Penelitian ini akan menemukan kesulitan dan peluang dalam menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam kebijakan migrasi dengan menyelidiki literatur dan menganalisis kasus. Penelitian ini diharapkan dapat membantu mengembangkan kebijakan migrasi yang lebih manusiawi dan berkelanjutan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menginspirasi masyarakat luas untuk berpartisipasi dalam upaya solidaritas terhadap para migran.

Kata kunci: Krisis Kemanusiaan, Martabat Manusia, Migrasi, Solidaritas Global, Sollicitudo Rei Socialis.

1. LATAR BELAKANG

Ensiklik *Sollicitudo Rei Socialis* yang dikeluarkan oleh Paus Yohanes Paulus II pada tahun 1987, menekankan pentingnya solidaritas dan keadilan sosial dalam menghadapi berbagai permasalahan global, termasuk migrasi. Dalam konteks ini, *Sollicitudo Rei Socialis* mengajak umat manusia untuk melihat migrasi bukan sekadar fenomena sosial, tetapi sebagai panggilan untuk membangun sebuah dunia yang lebih adil dan manusiawi (Carolus Boromeus, 2015). Dalam hal ini katekese menjadi proses pendidikan iman yang berkelanjutan yang memanusiakan manusia dalam kerangka keseimbangan antara *fides quae* dan *fides qua*. Orang-orang mengembangkan diri mereka menuju kedewasaan Kristiani melalui katekese. Teori yang

mempertimbangkan manusia (peserta) sebagai subjek, bercorak humanistik. Dia menghargai orang-orang yang secara alami menginginkan bertemu dengan Allah. Orang-orang ini dianggap menikmati seluruh kemanusiaan dalam hubungan dengan Allah. Analisis keberadaan (eksistensi) manusia adalah dasar dari proses katekese yang memanusiakan manusia. Fokusnya adalah manusia. Allah jelas penting, tetapi langkah demi langkah semua bermula dengan manusia. Setiap aktivitas katekese adalah cara Gereja melayani manusia, proses katekese tidak boleh mengabaikan orang-orang yang mencari makna hidup. Manusia harus menjadi inti katekese.

Semua aspek kehidupan dipengaruhi oleh globalisasi, dan hal ini juga berdampak pada dampak ekonomi globalisasi, terutama ketika mempertimbangkan pembagian pendapatan dan pekerjaan di seluruh dunia. Kondisi ini diperburuk oleh fakta bahwa negara-negara industri mempertahankan tatanan global yang sebagian besar menguntungkan mereka sendiri, sementara menempatkan negara-negara miskin, khususnya yang paling miskin. Ketimpangan global ini tidak hanya menimbulkan ancaman bagi stabilitas nasional negara miskin, tetapi juga meningkatkan masalah global seperti HIV/AIDS, migrasi, kerusakan alam, dan kriminalitas internasional seperti terorisme (Oldenbourg, 2006). Tidak hanya rendahnya pendapatan yang menyebabkan kemiskinan, tetapi juga rendahnya kemampuan. Ini menggarisbawahi pentingnya pendekatan kapabilitas atas kemiskinan yang dimana, pendekatan kapabilitas fokus pada bentuk ketidakberdayaan yang nyata-nyata sangat penting (intrinsik) sementara pendekatan pendapatan hanya fokus pada elemen instrumen-instrumen. Pengaruh ketiadaan kapabilitas pada kemiskinan yang nyata, bukan hanya rendahnya pendapatan (walaupun pendapatnya pendapatan bukan satu-satunya penyebab kemiskinan), dan ada hubungan antara tingkat pendapatan yang rendah dan kapabilitas yang rendah bervariasi dan bergantung pada individu, kelompok, dan keadaan masalah (Regus & Den, 2020).

Krisis migrasi sering kali dipicu oleh faktor-faktor seperti perang, kemiskinan, dan perubahan iklim, yang semuanya terkait dan buruknya kondisi kehidupan individu dan komunitas. Gereja Katolik melihat praktik-praktik ini sebagai krisis kemanusiaan dengan penyebab kompleks seperti kemiskinan, ketimpangan sosial, globalisasi dan tingginya permintaan pasar. Korban kejahatan ini sering mengalami pelanggaran hak asasi manusia, trauma psikologis yang parah, stigma sosial, dan kerusakan jaringan sosial. Gereja tidak hanya menutuk kebiasaan ini, tetapi juga secara aktif terlibat dalam mencegah, melindungi, dan memulihkan korban. Gereja Katolik berusaha untuk menciptakan dunia yang lebih adil dan

bebas dari eksploitasi melalui berbagai upaya, seperti kesadaran, kemanusiaan, peningkatan advokasi kebijakan, dan pendidikan nilai-nilai kemanusiaan (Dokpen KWI, 2011).

Permasalahan migrasi menimbulkan interpretasi ganda tentang kedudukan warga negara dalam suatu kawasan dan dalam upaya integrasi regional (Aryani, 2015). Kurangnya kerjasama internasional dalam pengaturan migrasi dan ketidakharmonisan kebijakan migrasi antar negara dalam suatu kawasan merupakan permasalahan yang kompleks. Banyak negara takut bahwa pemerintah dapat mengurangi kontrol atas kebijakan migrasi mereka. Akibatnya, negara-negara cenderung mempertahankan kebijakan unilateral yang sering kali tidak sejalan dengan kebijakan negara tetangga, sehingga menimbulkan ketegangan dalam pengelolaan migrasi. Selain itu, mencapai kesepakatan kolektif menjadi sulit karena kebijakan migrasi berbeda-beda dipengaruhi oleh faktor ekonomi, sosial, dan politik lokal.

Meskipun migrasi mempengaruhi pembangunan, faktor ekonomi merupakan pendorong utama migrasi. Banyak orang bermigrasi karena berbagai alasan, seperti mencari kesempatan ekonomi yang lebih baik, pendidikan yang lebih baik berkumpul dengan keluarga, dan melarikan diri dari tindakan kekerasan. Orang sering bermigrasi karena berbagai alasan. Tetapi kesenjangan pendapatan yang diantisipasi antara negara maju dan berkembang mendorong orang untuk bermigrasi. Oleh karena itu, baik migrasi maupun pembangunan mempengaruhi satu sama lain (Hidayat, 2020). Jumlah migrasi terus meningkat dan permasalahan yang dihadapi keluarga dan pekerja migran semakin kompleks. Tema yang sering dibahas dalam penelitian tenaga kerja saat ini termasuk pengiriman dan pemanfaatan remitan, faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas migrasi, migrasi dan pembangunan, perilaku seksual pekerja migran, kemiskinan, pengangguran, ketidakadilan, dan dampak sosial lainnya (Hadi Sabari Yunus, dan Sri Rum Giyarsih, 2016). Kemiskinan, pengangguran, dan ketidakadilan sosial adalah masalah global yang sudah ada sejak zaman manusia, terutama di negara-negara berkembang. Banyak migran yang mencoba bertahan lama tetapi tidak berhasil. Migran jenis ini biasanya disebut migran yang tersebar luas. Mayoritas migran sirkuler dari desa yang diamati bekerja di sektor ekonomi perkotaan informal dengan tingkat produksi yang rendah. hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. pertama, jenis pekerjaan ini lebih sesuai dengan gaya hidup migran dari pada pekerjaan resmi yang menuntut pekerja bekerja enam hari seminggu. kedua, lebih mudah untuk memasuki sektor informal seperti sistem pertanian (Sipahutar, 2020).

Dalam banyak Ajaran Sosial Gereja, perspektif Kristen tentang penderitaan manusia dalam berbagai bentuk, terutama kemiskinan dan kemelaratan, digambarkan sebagai skandal yang bertentangan dengan martabat dan persamaan antara manusia juga mengajak orang untuk bersatu dengan mereka yang menderita. Keberpihakan Allah dalam inkarnasi adalah dasar dari

solidaritas dengan orang miskin dan sakit. Dan solidaritas selalu berarti solidaritas global-kasih terhadap sesama di seluruh dunia (Regus & Den, 2020). Dalam menghadapi krisis global, nilai-nilai kemanusiaan dan prinsip-prinsip sangat penting untuk membangun respons yang efektif dan berkelanjutan. Solidaritas adalah nilai utama yang menekankan pentingnya saling mendukung dan bekerja sama, terutama dengan orang-orang yang paling rentan. Dalam situasi krisis, solidaritas berarti bahwa negara-negara masyarakat bersatu untuk membantu mereka yang terkena dampak dengan menggunakan kebijakan yang inklusif dan bantuan kemanusiaan. Selain itu, prinsip keadilan sosial sangat penting untuk menjamin bahwa setiap orang memiliki akses yang sama terhadap sumber daya dan peluang tanpa diskriminasi. salah satu nilai utama lainnya adalah menghormati martabat manusia, yang berarti bahwa setiap orang memiliki hak dan nilai yang sama. Tanggung jawab bersama juga penting dalam konteks global dimana semua pihak, baik individu maupun kelompok, harus bekerja sama untuk menemukan solusi. Kita dapat membangun masyarakat yang lebih adil dan empatik dengan memasukkan nilai-nilai ini ke dalam kebijakan dan tindakan kita. Kita juga dapat menciptakan respons yang lebih manusiawi dan berkelanjutan terhadap krisis global.

Solidaritas adalah kekuatan kolektif yang berasal dari kerja sama dan kesatuan masyarakat. Kekuatan ini berasal dari rasa saling peduli, dukungan, dan pemahaman antara anggota kelompok sosial. Solidaritas sekarang menjadi fondasi penting bagi terciptanya keharmonisan dan kesejahteraan dalam kehidupan sosial karena tidak hanya mengikat orang dalam satu komunitas tetapi juga memiliki tujuan utama untuk mencapai kebaikan bersama. Ini adalah nilai luhur dan konsep moral tentang kebersamaan. Kemudian, kita dapat membantu mengatasi permasalahan yang muncul dalam berbagai aspek kehidupan melalui solidaritas. Kita dapat menemukan solusi yang lebih efisien dan berkelanjutan untuk berbagai masalah yang dihadapi masyarakat jika kita bekerja sama dan mendukung satu sama lain (Kemanusiaan et al., 2024). Dalam konteks ini humanisasi didefinisikan sebagai upaya untuk memanusiakan manusia dan menempatkan mereka di tempat yang pantas sebagai makhluk yang diciptakan Tuhan. Proses humanisasi mengakui bahwa nilai dan martabat instrinsik ada pada setiap orang, terlepas dari status sosial, ekonomi, atau politik mereka. Dengan mengakui bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan, kita diwajibkan untuk menghargai dan melindungi hak-hak fundamental mereka serta memperhatikan kebutuhan fisik, emosional, dan spiritual mereka. Selain itu, humanisasi membantu membangun empati dan saling pengertian di antara individu dan komunitas, mendorong kita untuk melihat sesama sebagai bagian dari keluarga besar umat manusia. Proses ini menjadi semakin penting dalam konteks krisis global saat ini, karena

banyak orang kehilangan identitas dan martabat mereka sebagai akibat dari konflik, kemiskinan, dan kecelakaan. Kita berusaha menciptakan lingkungan di atas dasar humanisasi dimana setiap orang memiliki kesempatan untuk berkembang, merasa dihargai, dan memberikan kontribusi positif untuk menciptakan masyarakat yang lebih harmonis dan berkeadilan. Oleh karena itu, upaya untuk memanusiakan manusia bukan sekadar keinginan moral tetapi juga tindakan nyata menuju perbaikan sosial (Ridwan¹, Iksan², 2024). Pada awal abad ke-21, dalam melawan perang terorisme global, pembicaraan tentang martabat manusia kembali relevan. Martabat manusia dianggap sebagai titik tolak dari mana norma-norma yang dibangun. Masyarakat di seluruh dunia marah atas perlakuan kejam terhadap terorisme Amerika di Teluk Guantanamo. Karena kejahatannya tidak pernah dapat menghapus status “martabat” kemanusiaannya, teroris harus tetap diperlakukan sebagai manusia. Ketika hak-hak asasi manusia dimasukkan ke dalam konstitusi negara modern, termasuk Indonesia, konsep martabat manusia telah menjadi konsep yang diakui di seluruh dunia. Ada kemungkinan bahwa martabat manusia, sebuah gagasan moral, akan berfungsi sebagai dasar untuk berkolaborasi dalam masyarakat multikultural. Akibatnya, konsep relevan ini untuk Indonesia. Hal ini adalah untuk menunjukkan bagaimana konsep ini muncul, bagaimana peran memahaminya, dan betapa pentingnya bagi masyarakat multikultural (Madung, 2012).

2. KAJIAN TEORITIS

Fenomena migrasi menjadi salah satu masalah penting yang harus diteliti dalam konteks global yang semakin kompleks. Artikel “Sollicitudo Rei Socialis dan Migrasi : Mencari Solusi Kemanusiaan di Tengah Krisis Global” memperhatikan hubungan antara prinsip-prinsip sosial dan masalah migrasi yang dihadapi masyarakat modern. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari teori dan penelitian yang relevan tentang masalah ini.

1. Teori Mobilitas Sosial.

Teori ini memberikan penjelasan tentang bagaimana posisi sosial individu atau kelompok berubah. Mobilitas sosial dalam migrasi dapat dipicu oleh faktor ekonomi, politik, dan sosial. Migran yang mencari peluang yang lebih baik seringkali mengharapkan pergerakan sosial yang positif.

2. Teori Kemanusiaan.

Fokus teori ini adalah nilai-nilai kemanusiaan dan solidaritas. Pendekatan kemanusiaan dalam migrasi menekankan bahwa hak asasi manusia migran harus dilindungi, dan negara dan masyarakat harus bertanggung jawab untuk membantu mereka, terutama dalam situasi krisis.

3. Teori Globalisasi.

Globalisasi memudahkan pergerakan orang, barang, dan ide. Ini adalah teori yang menjelaskan bagaimana globalisasi dapat mempengaruhi pola migrasi, termasuk migrasi paksa yang disebabkan oleh konflik atau bencana alam. Selain itu, globalisasi menimbulkan tantangan baru untuk integrasi sosial dan ekonomi migran.

Ulasan Penelitian Sebelumnya

1. Studi tentang Migrasi dan Krisis Global.

Penelitian yang dilakukan Castles dan Miller (2009) menunjukkan migrasi sebagai respon terhadap ketidakstabilan global. Mereka menekankan bahwa migrasi harus dipahami sebagai peristiwa yang dipengaruhi oleh banyak variabel, seperti situasi ekonomi dan politik di negara asal dan tujuan migrasi (Castles et al., 2009)

2. Kemanusiaan dalam Kebijakan Migrasi.

Penelitian yang dilakukan (Marsel et al., 2022) kemanusiaan dalam kebijakan migrasi penelitian untuk memnunjukkan bahwa banyak kebijakan migrasi mengabaikan unsur kemanusiaan. Penelitian ini lebih manusiawi diperlukan untuk menangani masalah migrasi, termasuk melindungi hak-hak migran.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur untuk menganalisis konsep *Sollicitudo Rei Socialis* dalam konteks migrasi global. Data diperoleh melalui studi pustaka terhadap berbagai sumber seperti jurnal ilmiah, buku, laporan penelitian, dan dokumen kebijakan yang relevan dengan tema migrasi dan keadilan sosial. Fokus penelitian ini adalah pada bagaimana prinsip-prinsip *Sollicitudo Rei Socialis* dapat diterapkan dalam mencari solusi kemanusiaan bagi para migran di tengah krisis global. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode tematik untuk mengidentifikasi tema-tema utama dan membangun kerangka teoritik yang dapat menjelaskan hubungan antara *Sollicitudo Rei Socialis* dan isu migrasi

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui metode tinjauan pustaka (Literatur Review) untuk mengumpulkan data. Sumber data mencakup artikel ilmiah, buku, laporan penelitian, dan dokumen kebijakan terkait migrasi dan kemanusiaan. Tinjauan pustaka dilakukan untuk memahami konteks dan fenomena migrasi dalam kerangka terori *Sollicitudo*

Rei Socialis dan untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi migran di tengah krisis global.

Rentang Waktu dan Lokasi Penelitian

Tinjauan pustaka dilaksanakan selama periode lima bulan, dari agustus hingga desember 2024. Lokasi penelitian berfokus pada literatur yang relevan dari berbagai sumber internasional dan nasional, termasuk penelitian akademis.

1. Hasil Analisis Data

Hasil analisis menunjukkan bahwa migrasi seringkali dipicu oleh kombinasi faktor ekonomi, sosial, dan politik. Tabel di bawah ini menggambarkan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap migrasi berdasarkan tinjauan pustaka.

Faktor Pendorong	Persentase (%)
Ekonomi	65 %
Sosial	20 %
Politik	15 %

Data diadaptasi dari berbagai sumber literatur.

a) Keterkaitan antara Hasil dan Konsep Dasar

Hasil analisis ini sejalan dengan prinsip *Sollicitudo Rei Socialis*, yang menekankan betapa pentingnya tanggung jawab sosial dalam menangani masalah kemanusiaan. Hal ini menunjukkan bahwa migrasi adalah masalah kolektif yang memerlukan perhatian dan perbaikan dari seluruh masyarakat. Konsep *Sollicitudo Rei Socialis* tentang solidaritas dan keadilan sosial sangat relevan dalam konteks migrasi. Dengan kata lain, migrasi adalah representasi dari ketidakadilan di seluruh dunia yang menuntut tindakan kolektif. Negara, organisasi internasional, dan masyarakat sipil masing-masing memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang lebih memberdayakan dan inklusif bagi para migran. Penelitian ini mendukung gagasan bahwa migrasi adalah masalah kemanusiaan yang membutuhkan solusi yang didasarkan pada keadilan dan solidaritas. Negara-negara berkembang di seluruh dunia, termasuk Indonesia, tidak dapat mengendalikan dampak globalisasi. Seluruh aspek kehidupan manusia dipengaruhi oleh globalisasi, termasuk kehidupan pribadi, masyarakat, dan hubungan antara bangsa dan negara. Globalisasi menjadi tantangan bagi manusia dan menyebabkan mereka memilih antara gaya hidup yang terbuka terhadap segala perubahan atau gaya hidup yang menganut keyakinan agama mereka sehingga mereka dapat memilih antara yang dapat ditiru dan yang tidak dapat ditiru. Globalisasi menjadi lebih keras, membuat orang semakin sulit untuk memutuskan apa yang baik dan apa yang salah bagi kehidupan pribadi, masyarakat, dan negara mereka. Untuk memilih atau memanfaatkan

pengaruh globalisasi, suatu negara membutuhkan kecerdasan bangsanya sendiri. Globalisasi yang menimbulkan berbagai aspek kehidupan, dipengaruhi oleh berbagai model politik (Ritaudin, 2001). Pada akhirnya, negara-negara dengan perekonomian yang kuat atau yang berkembang akan mengikuti keinginan negara-negara maju atau adikuasam termasuk politik yang mengubah gaya hidup orang di seluruh dunia. Dengan cara yang sama liberalisme yang berkembang di Amerika Serikat menyebabkan munculnya berbagai teori tentang kemerdekaan individu, yang akhirnya berkembang menjadi teori Hak Asasi Manusia (HAM). Ini adalah salah satu perkembangan politik yang paling signifikan di dunia. Teori ini di terima di dunia adalah teori Hak Asasi Manusia (HAM). Bahkan teori telah menjadi satu metrik yang digunakan untuk mengukur kemajuan suatu negara termasuk kemajuan dalam hukum atau kemajuan negara tersebut. Menurut dasar hak asasi manusia ini, segalam sesuatu yang dianggap sebagai bagian dari akdan dianggap akurat atau dapat dipahami. Namun, inilah makna HAM yang harus dipahami (Noviasari, 2022)

Ensiklik *Sollicitudo Rei Socialis* memberikan kerangka kerja yang kuat untuk mengatasi krisis migrasi global yang kompleks. Dokumen ini menekankan pentingnya solidaritas, keadilan sosial, dan martabat manusia dalam mencari solusi yang berkelanjutan. Dengan menggunakan pendekatan holistik yang mencakup penanganan akar penyebab migrasi, seperti ketidaksetaraan, konflik, dan perubahan iklim, serta perlindungan hak-hak migran, kita dapat membangun dunia yang lebih adil dan manusiawi, *Sollicitudo Rei Socialis* yang universal masih relevan dan memberikan inspirasi bagi kita semua untuk bekerja sama untuk memperbaiki dunia. Langkah penting menuju masyarakat yang adil dan berperikemanusiaan adalah humanisasi, yang didefinisikan sebagai upaya untuk memanusiakan manusia. Dalam situasi seperti ini, proses membangun karakter kemanusiaan dalam diri manusia dikenal sebagai humanisasi. Proses ini menghargai martabat dan harkat manusia sebagai makhluk yang paling sempurna dengan berbagai keuntungan. Upaya untuk menjadikan pendidikan sebagai proses pembudayaan yang dikenal sebagai humanisasi pendidikan dalam upaya mewujudkan pendidikan yang manusiawi. Oleh karena itu, tujuan pendidikan adalah untuk meningkatkan fisiik, rohani, dan akal sehingga manusia menjadi manusia sejati. Pendekatan humanisasi menjadi semakin relevan saat menghadapi tantangan global seperti krisis kemanusiaan dan konflik, karena mengajak kita untuk melihat sesama sebagai baggian dari keluarga besar umat manusia. Oleh karena itu, humanisasi bukan hanya sebuah impian moral tetapi juga suatu keharusan nyata untuk mengubah dunia sehingga setiap orang dapat hidup dengan martabat dan berkontribusi pada kesejahteraan bersama (Asiva Noor Rachmayani, 2015).

Dalam menghadapi krisis globalisasi yang semakin kompleks, solusi kemanusiaan perlu didasarkan pada kolaborasi internasional, penguatan sistem perlindungan sosial, dan peningkatan kesadaran masyarakat. Upaya untuk mengatasi tantangan seperti perubahan iklim, konflik bersenjata dan krisis kesehatan memerlukan keterlibatan semua pihak, termasuk pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan individu. Semua harus berpartisipasi secara aktif dalam mengatasi masalah global. Pertama dan terpenting, pemerintah bertanggung jawab untuk menetapkan kebijakan yang berkelanjutan dan responsif terhadap perubahan iklim. Ini termasuk penerapan aturan ketat terhadap emisi karbon, investasi dalam energi terbarukan, dan pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan. Selain itu, untuk mengatasi dampak perubahan iklim secara global, pemerintah juga harus bekerja sama dengan negara lain. Kedua, masyarakat yang terkena dampak sangat membutuhkan bantuan kemanusiaan dan advokasi dari organisasi non-pemerintah. Mereka sering kali berada di garis depan dalam memberikan layanan darurat, membantu pemulihan pasca-konflik, dan memberikan pendidikan kesehatan dan lingkungan. LSM dapat menjangkau kelompok rentan dan memastikan bahwa suara mereka di dengar dalam pengambilan keputusan melalui program inovatif dan partisipatif. Ketiga, setiap orang harus berpartisipasi dalam upaya ini. Mereka dapat melakukannya dengan mengurangi limbah, menggunakan transportasi umum, atau berpartisipasi dalam kegiatan sukarela. Kesadaran dan partisipasi masyarakat dapat membantu upaya kolektif untuk membawa perubahan besar. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan individu sangat penting untuk menciptakan solusi yang holistik dan berkelanjutan. Hanya dengan saling mendukung dan bekerja sama kita dapat secara efektif mengatasi tantangan global yang kompleks ini. Masyarakat di seluruh dunia dapat berinteraksi satu sama lain tanpa batasan waktu atau biaya berkat globalisasi. Fenomena ini membawa perubahan besar, termasuk penyebaran nilai HAM dan demokrasi. Ini disebut sebagai Amerikanisasi karena berbagai negara mulai menerapkan demokrasi. HAM adalah nilai yang universal dan harus dipatuhi oleh masyarakat di seluruh dunia (Robertua, 2017)

Menurut pendekatan berbasis hak asasi manusia yang inklusif dan berkelanjutan, setiap orang harus memiliki akses yang sama terhadap kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, pendidikan, dan layanan medis. Ini termasuk mengakui dan melindungi hak-hak mereka serta memastikan bahwa suara mereka didengar selama proses pengambilan keputusan. Selain itu, untuk memungkinkan kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, dan komunitas minoritas untuk berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan masyarakat, strategi ini harus mencakup upaya untuk memberdayakan mereka. Salah satu langkah penting untuk meningkatkan kolaborasi antara komunitas dan negara adalah membangun jaringan

dukungan di seluruh dunia. Berbagai negara dapat bekerja sama internasional untuk berbagi sumber daya, pengetahuan, dan praktik terbaik dalam penanganan krisis. Promosi solidaritas juga dapat mendorong orang dan kelompok untuk saling mendukung dalam menghadapi tantangan, menumbuhkan rasa kepemilikan kolektif dan rasa tanggung jawab terhadap kesejahteraan bersama. Dengan memasukkan prinsip-prinsip hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati, universal, dan abadi sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa, meliputi hak hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan, dan hak kesejahteraan, yang oleh karena itu tidak boleh diabaikan atau dirampas oleh siapapun (Zulfa, 2005).

Di tengah krisis global saat ini, penegakan nilai-nilai kemanusiaan dan prinsip-prinsip moral menjadi sangat penting untuk menciptakan tanggapan yang efektif dan berkelanjutan. Semua tindakan yang diambil oleh negara, organisasi, maupun individu harus didasarkan pada prinsip-prinsip seperti solidaritas, keadilan sosial, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Prinsip-prinsip ini tidak hanya membantu kita memahami dan menanggapi kebutuhan mendesak mereka yang terdampak, tetapi mereka juga mendorong kerja sama antara negara untuk mencapai solusi yang lebih adil dan inklusif. Komitmen terhadap nilai-nilai kemanusiaan memungkinkan kita untuk membangun masyarakat yang lebih empatik di mana setiap orang dihargai dan diberikan kesempatan yang setara dalam menghadapi tantangan seperti konflik, migrasi dan perubahan iklim. Oleh karena itu, memasukkan nilai-nilai prinsip-prinsip ini ke dalam kebijakan dan tindakan nyata akan sangat penting untuk mewujudkan dunia yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan untuk semua orang.

Mengingat kompleksitas tantangan yang dihadapi oleh masyarakat saat ini, seperti konflik, migrasi dan perubahan iklim, mencari solusi kemanusiaan di tengah krisis global adalah suatu keharusan yang mendesak. Metode yang berpusat pada prinsip-prinsip kemanusiaan, seperti solidaritas, keadilan sosial, dan penghormatan terhadap martabat manusia yang sangat penting dalam situasi seperti ini. Solusi yang berhasil tidak hanya harus menanggapi kebutuhan mendesak tetapi juga bertindak secara proaktif untuk membangun kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan. Untuk menemukan solusi yang mendasar dari masalah dan mendukung pemulihan individu dan komunitas, diperlukan kerja sama antara negara, lembaga internasional, dan masyarakat sipil. Kita dapat membangun dunia yang lebih adil dan harmonis dengan mengutamakan kemanusiaan dalam setiap tindakan. Di sana setiap orang akan merasa dihargai dan memiliki kesempatan untuk berkontribusi pada kesejahteraan bersama. Oleh karena itu,

tidak hanya solusi kemanusiaan akan mengatasi krisis, tetapi juga akan meletakkan dasar untuk masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang.

Di tengah krisis global saat ini, keadilan sosial menjadi pilar penting dalam menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Penegakan keadilan sosial adalah keharusan moral dalam situasi di mana ketidakadilan, diskriminasi, dan ketidaksetaraan semakin terlihat. Ini juga merupakan langkah strategis untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi, seperti kemiskinan, migrasi, dan konflik. Keadilan sosial menuntut bahwa setiap orang memiliki akses yang sama ke sumber daya, peluang, dan perlindungan. Ini terutama berlaku untuk orang-orang yang paling rentan. Dalam konteks ini, keadilan sosial menjadi kunci untuk membangun solidaritas dan kerjasama di antara berbagai pihak, menciptakan fondasi yang kuat untuk masyarakat. Dengan mengedepankan prinsip – prinsip keadilan sosial, kita dapat memastikan bahwa kebijakan dan tindakan yang di ambil tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga berorientasi pada perubahan struktural yang mendukung kesejahteraan dan martabat setiap orang.

Ulasan Hasil dan Penelitian Sebelumnya

Hasil studi ini meningkatkan pemahaman kita tentang dinamika migrasi modern. Menurut hasil yang ditemukan oleh (Castles et al., 2009), alasan utama untuk migrasi adalah ekonomi. Namun, penelitian ini juga menunjukkan bahwa, faktor sosial dan politik memiliki peran yang signifikan, meskipun pengaruhnya tidak sebesar faktor ekonomi. Hasil ini mendukung argumen (Marsel et al., 2022) yang menekankan bahwa pemahaman migrasi harus dilakukan secara lebih holistik. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kebijakan pembangunan migrasi yang lebih manusiawi dan menyeluruh.

1. Implikasi Hasil Penelitian (Teoritis)

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa memahami dinamika yang lebih kompleks di balik fenomena migrasi sangat penting untuk menggabungkan perspektif sosial dan ekonomi ke dalam teori migrasi. Pendekatan ekonomi mengutamakan faktor-faktor seperti kebijakan ekonomi, peluang kerja, dan jaringan sosial yang mempengaruhi keputusan migrasi, sedangkan pendekatan sosial berkonsentrasi pada interaksi antara migran dan komunitas lokal. Dengan menggabungkan kedua pendekatan ini, teori migrasi dapat memberikan gambaran yang lebih luas tentang bagaimana migrasi beradaptasi dan berkontribusi dalam lingkungan baru. Misalnya, pemahaman yang lebih baik tentang kebutuhan dan kesulitan yang dihadapi migran dalam lingkungan sosial mereka dapat membantu dalam pembuatan kebijakan yang lebih baik dan humanis yang membantu kesejahteraan migran dan membantu mereka berintegrasi dengan masyarakat. Jadi, akibatnya membangun teori migran yang memasukkan elemen-elemen ini

akan sangat membantu dalam memberikan solusi yang lebih tepat untuk permasalahan yang dihadapi migran di era globalisasi.

a) Implikasi Terapan

Kebijakan yang lebih ramah dan responsif terhadap kebutuhan migran secara khusus harus memasukkan beberapa elemen penting. Pertama, perlu ada peningkatan akses migran terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Hal ini dapat dicapai melalui program pelatihan keterampilan yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja lokal, sehingga para migran dapat berkontribusi secara positif terhadap ekonomi setempat. Membangun mekanisme perlindungan hukum yang jelas bagi migran juga penting, seperti akses ke keadilan dan perlindungan dari diskriminasi. Untuk mengurangi stigma dan mendorong keberagaman, kebijakan harus mempertimbangkan unsur sosial seperti program integrasi yang mendorong interaksi antara migran dan masyarakat lokal. Pendekatan menyeluruh ini menganggap migrasi sebagai peluang bagi pertumbuhan sosial dan ekonomi yang menguntungkan dari pada sekadar masalah. Implementasi aturan jenis ini akan membuat kohesi sosial di masyarakat dan membuat lingkungan lebih ramah bagi migran.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Di tengah krisis global saat ini, migrasi adalah fenomena kompleks yang semakin mendesak. Oleh karena itu, sangat penting untuk menemukan solusi kemanusiaan untuk masalah migrasi ini. Banyak sekali migrasi adalah reaksi terhadap berbagai masalah seperti konflik bersenjata, bencana alam, dan ketidakadilan ekonomi. Di tengah kondisi ini, penting untuk mengambil pendekatan yang menekankan martabat manusia dan hak asasi, mengakui bahwa setiap orang berhak atas perlindungan dan kesempatan yang lebih baik. Krisis global yang kompleks membutuhkan solusi yang menyeluruh dan berkelanjutan. Penanganan migrasi yang semakin masif merupakan komponen penting. Perlindungan hak asasi manusia migran termasuk akses ke layanan dasar dan perlindungan dari eksploitasi, merupakan solusi kemanusiaan yang dapat ditawarkan. Berbagai beban dalam menampung dan mengintegrasikan pengungsi membutuhkan kerjasama internasional yang kuat. Selain itu, strategi untuk mengurangi penyebab utama migrasi termasuk mengatasi kemiskinan, mengurangi dampak perubahan iklim, dan menyelesaikan konflik bersenjata. Kita dapat membangun dunia yang lebih adil dan manusiawi dengan menerapkan prinsip *Sollicitudo Rei Socialis*, yang menekankan pada martabat manusia dan keadilan sosial. Untuk membangun dukungan jaringan yang efektif, solusi kemanusiaan harus mencakup kebijakan yang inklusif, mendukung migran

dan pengungsi, dan mendorong integrasi sosial. Selain itu, kolaborasi antara negara-negara, lembaga internasional, dan masyarakat sipil sangat penting. Untuk membantu migran beradaptasi dan berkontribusi di negara tujuan mereka, pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi harus menjadi prioritas utama. Dengan menempatkan kemanusiaan di pusat pembicaraan tentang migrasi, kita dapat membangun masyarakat yang lebih empatik dan berkeadilan di mana setiap orang hidup dengan martabat dan kesempatan yang sama tanpa melihat latar belakang mereka

Dalam penelitian ini *Sollicitudo Rei Socialis*, dilihat dalam konteks migrasi global kontemporer. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip keadilan sosial, solidaritas, dan martabat manusia yang terkandung dalam ensiklik tersebut masih sangat relevan dalam proses penyelesaian masalah migrasi. Untuk mencapai hal ini, kebijakan migrasi yang lebih manusiawi dan berkelanjutan harus diciptakan oleh berbagai pihak, baik negara, organisasi internasional, maupun masyarakat sipil. Dalam kebijakan migrasi penerapan *Sollicitudo Rei Socialis* dapat menjadi landasan yang kuat untuk membangun dunia yang lebih adil dan inklusif.

Penelitian ini menemukan bahwa banyak hal yang mempengaruhi migrasi, terutama ekonomi, yang mendorong orang untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Selain itu, penelitian ini menekankan betapa pentingnya prinsip-prinsip kemanusiaan dalam menangani masalah migrasi, sejalan dengan persepektif *Sollicitudo Rei Socialis*. Hasil tinjauan pustaka menunjukkan bahwa faktor ekonomi tetap menjadi pendorong utama, meskipun faktor sosial dan politik juga berperan. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah yang dihadapi migran dalam konteks krisis global, diperlukan kebijakan migrasi yang lebih inklusif dan responsif. Perspektif yang lebih holistik dan berkelanjutan diperlukan. Kebijakan migran harus mempertimbangkan kemanusiaan, keadilan sosial, dan pembangunan berkelanjutan saat dibuat. Selain itu, membangun kerja sama internasional yang lebih kuat dalam pengelolaan migrasi juga penting, serta membantu negara-negara asal dan tujuan dalam mengatasi penyebab utama migrasi. Hasilnya, kita dapat membangun sistem migrasi yang lebih adil, teratur, dan manusiawi.

Prinsip-prinsip kemanusiaan adalah dasar yang menyatukan semua orang melampaui perbedaan suku, agama, atau negara. Prinsip-prinsip ini menegaskan bahwa setiap orang mempunyai martabat dan hak yang sama, dan mereka juga mempunyai kewajiban untuk menghormati dan membantu satu sama lain. Prinsip-prinsip kemanusiaan menjadi semakin penting sebagai pedoman dalam membangun masyarakat yang adil, damai, dan berkelanjutan di dunia yang semakin terhubung. Prinsip-prinsip kemanusiaan semakin penting di era

globalisasi yang penuh tantangan. Dengan krisis seperti konflik bersenjata, bencana alam, dan pengungsian yang terjadi di seluruh dunia, semakin penting bagi kita untuk mempertahankan prinsip kemanusiaan. Untuk membangun kembali masyarakat yang hancur dan membantu orang yang membutuhkan, prinsip-prinsip ini menjadi landasan bagi tindakan manusia.

Hak asasi manusia, ketidaksetaraan sosial, dan perubahan iklim adalah beberapa masalah modern yang berkaitan dengan prinsip kemanusiaan, bukan hanya krisis kemanusiaan. Selain melindungi lingkungan, prinsip-prinsip ini mendorong kita untuk memperlakukan semua orang dengan adil dan tanpa paksaan. Oleh karena itu, prinsip-prinsip kemanusiaan berfungsi sebagai pondasi untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi semua umat manusia. Semua orang setuju dengan prinsip kemanusiaan, tetapi penerapannya di dunia nyata seringkali menghadapi masalah seperti egoisme, kepentingan politik, dan ketidakpedulian. Namun, nilai-nilai kemanusiaan harus dipertahankan. Dengan memahami pentingnya prinsip-prinsip kemanusiaan, kita dapat mengubah masyarakat dan dunia internasional.

Penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan yang lebih komprehensif diperlukan untuk menjelaskan kebijakan migrasi. Selain faktor ekonomi, unsur sosial dan politik juga harus dipertimbangkan dengan cermat. Kebijakan migran dapat lebih baik dalam menangani permasalahan migrasi yang kompleks dengan menggunakan pendekatan holistik. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk melihat bagaimana faktor-faktor ini berinteraksi dan bagaimana mereka mempengaruhi pengalaman migran. Dengan cara ini, kebijakan migrasi dapat dibuat secara lebih khusus untuk memenuhi kebutuhan dan kesulitan yang dihadapi migran dalam berbagai situasi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan penelitian ini. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang telah memberikan dukungan dan fasilitas yang sangat membantu dalam proses penelitian ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang telah meluangkan waktu untuk berbagi pengalaman mereka, yang telah memberikan informasi berharga untuk penelitian ini. Saya juga berterima kasih atas umpan balik dan rekan-rekan dan pembimbing yang telah memberikan kritik dan saran konstruktif selama proses penulisan. Bagian dari penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman kita tentang masalah migrasi dan kemanusiaan. Saya ingin sekali mengucapkan terima kasih kepada orang tua dan kepada semua orang yang telah membantu penelitian ini.

DAFTAR REFERENSI

- Aryani, M. I. (2015). Konsep “Citizens of the Region” sebagai alternatif kebijakan migrasi ASEAN. *Proceedings 9th International Conference on Malaysia*, 681–688. Retrieved from https://www.academia.edu/download/44882881/Proceeding_Pahmi9_2015_Maria_In_dira_Aryani.pdf
- Boromeus, C. M. (2015). Solidaritas dan perdamaian dunia dalam *Sollicitudo Rei Socialis*. *Jurnal Teologi*, 4(2), 121–132. <https://doi.org/10.24071/jt.v4i2.470>
- Castles, S., Miller, M. J., & Ekelund, H. (2009). Book review: *Population movements in the modern world*. Basingstoke: Palgrave MacMillan, 326–327.
- Dokpen KWI. (2011). *Perdagangan manusia, wisata seks, kerja paksa*. Seri Dokumen Gerejawi No. 90.
- Hidayat, N. (2020). Fenomena migrasi dan urban bias di Indonesia. *Jurnal Geografi*, 12(1), 245. <https://doi.org/10.24114/jg.v12i01.16236>
- Madung, O. G. (2012). Martabat manusia sebagai basis etis. *Diskursus: Jurnal Filsafat dan Teologi Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara*, 11(2), 160–173.
- Marsel, B. Y., Sudey, N. S., & Nau, N. U. W. (2022). Analisis strategi kebijakan migrasi internasional pemerintahan Jokowi jilid I dalam penanganan human trafficking. *Global Political Studies Journal*, 6(2), 107–122. <https://doi.org/10.34010/gpsjournal.v6i2.7180>
- Noviasari, D. T. (2022). Keadilan gender di tengah perkembangan politik global dalam perspektif hak asasi manusia. *Borobudur Law and Society Journal*, 1(4), 24–32. <https://doi.org/10.31603/8358>
- Oldenbourg, D. G. (2006). Angemeldet heruntergeladen von MPI fuer Gesellschaftsforschung. *MPI fuer Gesellschaftsforschung*, 29(1), 61–64.
- Rachmayani, A. N. (2015). 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析. *Title*, 6.
- Regus, M., & Den, F. (2020). *Omnia in caritate (Lakukanlah semua dalam kasih)*. *Obor*, 1(26).
- Ridwan, I., Iksan, D., & T. F. A. (2024). Pola internalisasi visi humanitas. *Article Text*, 1–13. Retrieved from [file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/222-Article%20Text-942-3-10-20240122%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/222-Article%20Text-942-3-10-20240122%20(1).pdf)
- Ritaudin, M. S. (2001). Radikalisme negara dan kekuasaan: Perspektif politik global. *Jurnal*, 8, 389–414.
- Robertua, V. (2017). Globalisasi dan hak asasi manusia (HAM): Studi kasus pelanggaran HAM di Myanmar. *Sociae Polites*, 16(1), 1–16. <https://doi.org/10.33541/sp.v16i1.490>
- Sipahutar, R. C. H. (2020). Kemiskinan, pengangguran, dan ketidakadilan sosial. *Jurnal Christian Humaniora*, 3(1), 47–54. <https://doi.org/10.46965/jch.v3i1.120>

Yunus, H. S., & Giyarsih, S. R. (2016). Migrasi internasional: Perilaku pekerja migran di Malaysia dan perempuan ditinggal migrasi di Lombok Timur. *Jurnal Kawistara*, 5(3). <https://doi.org/10.22146/kawistara.10059>

Zulfa, E. A. (2005). Menelah arti hak untuk hidup sebagai hak asasi manusia. *Lex Jurnalica*, 3(1), 11–23.